

PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV			Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Unit Kerja	Keterangan
					Target	Realisasi	%				Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	40%	Jumlah implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat / Jumlah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat x 100%	40%	40%	100.00	Bina mental : - Implementasi kebijakan urusan bina mental : Perwal No. 20 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah Kesos : - Implementasi kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Perwal No. 49 Tahun 2022 Tentang Jam Malam Anak - Implementasi kebijakan urusan Kesehatan : Perda No. 4 Tahun 2021 Tentang Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Menular - Implementasi kebijakan urusan Pengendalian Penduduk dan KB : Perda No. 8 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga - implementasi kebijakan urusan sosial : Perwal No. 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin - implementasi kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Kepwal No. 450 Tahun 2021 Tentang Program Dapur Balita Sehat - implementasi kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : RAD Ketahanan Keluarga Tahun 2016 tentang 1000 hari kehidupan (Stunting) - implementasi kebijakan urusan sosial : Perwal No. 21 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kesmas : - Implementasi kebijakan urusan Pendidikan : Perwal No 10 Tahun 2022 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah - Implementasi kebijakan urusan Pendidikan : Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan - Implementasi kebijakan urusan Ketertiban : Perwal No. 51 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kota Yogyakarta - Implementasi kebijakan urusan Ketertiban : Perda No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Kepemudaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.851.265.000,00	3.782.906.396,00	98,23	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi status	Hasil Status Evaluasi Kemendagri	Tinggi status	Sedang status	96.48	Realisasi indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2022. Hasil evaluasi tahun 2023 atas LPPD Kota Yogyakarta tahun 2022 mendapat skor 3,29 dengan status kinerja Sedang.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.525.084.572,00	1.440.986.772,00	94,49	Bagian Tata Pemerintahan	
									PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.637.857.224,00	1.588.243.597,00	96,97	Bagian Hukum	
3	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian	71.32 indeks	45% x Kinerja Kebijakan perekonomian + 35% x Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD + 20% x Kinerja Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani	71.32 indeks	77.09 indeks	108.09	Realisasi TW IV diperoleh dari capaian indikator persentase terlaksananya kebijakan perekonomian sebesar 57,1%, indikator persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja baik sebesar 92,31%, dan indikator persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti 95,35%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	893.866.000,00	888.303.769,00	99,38	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	
									PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	934.932.000,00	916.911.008,00	98,07	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV			Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Unit Kerja	Keterangan
					Target	Realisasi	%				Realisasi	%		
					6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94.6 indeks	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	94.6 indeks	99.10 indeks	104.76	Capaian indeks pelaksanaan pembangunan TW IV diperoleh dari gabungan realisasi indikator program sebagai berikut: realisasi ketepatan pelaksanaan pembangunan TW IV tahun 2023 sebesar 99,35% (Data per tanggal 10 Januari 2024) dan jumlah paket tender yang tepat waktu s.d TW IV ada sebanyak 67 paket dari rencana tender sebanyak 689 paket (98,53%)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	516.637.930,00	515.594.100,00	99,80	Bagian Administrasi Pembangunan	
									PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	594.668.320,00	592.017.380,00	99,55	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
5	Meningkatnya kebijakan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	81.5 indeks	Hasil Survey Kepuasan Layanan Eksternal dan Internal	81.5 indeks	84.24 indeks	103.4	Pelaksanaan hasil SKM Perangkat Daerah/ Unit Kerja baik eksternal maupun internal dilakukan setahun sekali sesuai dengan PermenPAN no.14 tahun 2017. Sedangkan yang menyelenggarakan SKM 2 kali yaitu Puskesmas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	461.029.750,00	453.745.970,00	98,42	Bagian Organisasi	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	557.384.610,00	544.351.750,00	97,66	Bagian Organisasi	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.679.794.422,00	8.462.586.986,00	97,50	Bagian Umum dan Protokol	
6	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A	Rata-rata hasil penilaian mandiri RB Bagian	A	A	100	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi diperoleh dari nilai rata-rata semua Bagian. Realisasi menggunakan data penilaian mandiri RB TW III 2023 karena evaluasi penilaian mandiri RB Tw IV masih dalam proses. Karena itu predikat nilai RB belum bisa diberikan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	414.132.950,00	404.759.753,00	97,74	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	666.317.363,00	629.232.760,00	94,43	Bagian Tata Pemerintahan	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.201.801.578,00	1.182.757.670,00	98,42	Bagian Hukum	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	766.436.100,00	757.398.932,00	98,82	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	278.959.800,00	271.166.493,00	97,21	Bagian Administrasi Pembangunan	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.203.934.624,00	1.184.467.699,00	98,38	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	495.019.815,00	456.270.338,00	92,17	Bagian Organisasi	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.910.699.000,00	1.868.257.094,00	97,78	Bagian Umum dan Protokol	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.411.589.087,00	24.696.137.919,00	93,50	Bagian Administrasi dan Keuangan	

Faktor Pendorong:

- 1 Komitmen bersama dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat
- 2 Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan OPD pengampu terhadap penyusunan LPPD
- 3 Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan
- 4 Adanya Kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber Kementerian Dalam Negeri kepada tim Penyusun LPPD
- 5 Adanya kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi di antara pegawai
- 6 Adanya dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal Pemkot
- 7 Tersedianya instrumen untuk penilaian kinerja untuk menilai BUMD dan BLUD

- 8 Adanya desk pemetaan kerjasama daerah
- 9 Sistem manajemen pengetahuan kerja sama yang bisa diakses secara online
- 10 Adanya optimalisasi koordinasi melalui media komunikasi informal dan formal
- 11 Telah dilakukan pendampingan dan sosialisasi terkait pengisian RUP bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
- 12 Adanya komitmen dan kerjasama yang baik dari masing-masing OPD terhadap kegiatan Input data SIRUP sehingga perbaikan/perubahan data SIRUP dapat tertangani dengan baik
- 13 Ditetapkannya Perwal no. 62 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas perwal yogyakarta nomor 117 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah kota yogyakarta
- 14 danya target yang sudah ditetapkan dan karena hal tersebut maka target harus dapat dicapai agar kinerja perangkat daerah mendapatkan nilai baik
- 15 Adanya monev realisasi fisik tiap bulan
- 16 Ada Early Warning Report yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke kepala OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring
- 17 Komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dan memberikan pelayanan prima serta menindaklanjuti rekomendasi SKM tahun sebelumnya
- 18 Pembinaan dan monitoring Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja
- 19 Upaya secara berkelanjutan melakukan perbaikan pelayanan.
- 20 Komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam meningkatkan hasil penilaian mandiri RB

Uraian Permasalahan

- 1 Terdapat ketidakinkronan pada Kepwal No 212 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumpun Tugas dan Fungsi pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbit pada 28 April 2023 dengan nomenklatur perencanaan yang telah disusun oleh Bagian Kesra Setda untuk tahun 2023 yang sesuai Kepmendagri 050-5089 Tahun 2021.
- 2 Adanya data IKK dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari OPD menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama
- 3 Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta
- 4 Adanya perbedaan petunjuk teknis pedoman penyusunan LPPD dan Kertas Kerja Evaluator (KKE) sehingga OPD sulit menentukan data mana yang dipakai
- 5 Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung seperti apa yang benar
- 6 Capaian kinerja dibandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor atau nilai karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi
- 7 Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap
- 8 Belum semua OPD memberikan data yang dibuluhkan secara lengkap dan tepat waktu
- 9 Belum tersedianya sistem informasi yang dapat diakses secara online sehingga menghambat penyampaian data/informasi terkait pengendalian perekonomian maupun BUMD dan BLUD
- 10 Belum semua dokumen kesepakatan bersama ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama karena perencanaan yang kurang matang dan OPD pengusul
- 11 Belum tersedianya SOP masing-masing sub unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas utama (TP1D, TP2DD, KUR)
- 12 Kurangnya pemahaman para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam entri data SIRUP yang mengakibatkan adanya perubahan data pada RUP
- 13 Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa ke BPBJ tidak sesuai dengan tatacara yang tercantum dalam perencanaan pada SIRUP selain itu apabila ada kesalahan dalam dokumen pemilihan tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sehingga membuluhkan perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia
- 14 Ada OPD yang masih lemah di perencanaan sehingga membuat pekerjaan terlambat
- 15 Masih ada OPD yang tidak tepat membuat target fisik
- 16 Belum optimalnya pemanfaatan layanan digital dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
- 17 Perubahan aturan PermenPANRB 25/2020 menjadi PermenpanRB nomor 3 tahun 2023 sehingga menyebabkan road map dan penyusunan rencana aksi RB berubah. Sistem penilaian PMPRB tidak dilakukan lagi tetapi masih menunggu aturan lebih lanjut dari Kementerian RB

Rencana Tindak Lanjut

- 1 Koordinasi secara intensif dan berkesinambungan dengan mitra OPD terkait
- 2 Melaksanakan koordinasi dengan OPD penyusun IKK
- 3 Melaksanakan koordinasi dengan OPD penyusun dan tim APIP terkait perubahan data dan format LPPD sebelum dilaksanakan revisi
- 4 Melaksanakan koordinasi dengan OPD penyusun, Tim APIP dan Timda untuk menentukan data mana yang dipakai/disepakati

- 5 Melaksanakan Bimtek dengan melibatkan narasumber dari Kemendagri
- 6 Melakukan perbaikan berkesinambungan data IKK berdasarkan klarifikasi Timda
- 7 Mengirimkan surat permintaan data dan membentuk media komunikasi yang efektif
- 8 Menyusun rancangan sistem informasi dalam bentuk sistem pengelolaan pengetahuan
- 9 Membentuk media komunikasi yang efektif
- 10 Dilakukan desk lanjutan
- 11 Dilakukan pencermatan ulang pada usulan kerjasama
- 12 Dilakukan penyusunan SOP untuk masing-masing unsur
- 13 Melaksanakan pendampingan/ fasilitasi konsultasi terkait pengadaan barang/jasa
- 14 Melakukan koordinasi secara intens dengan OPD terkait waktu pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan melakukan pendampingan apabila diperlukan saat ada revisi/ kesalahan pada dokumen pemilihan
- 15 Melaksanakan pra monev kegiatan agar target fisik dapat tercapai
- 16 Melakukan pendampingan ke OPD yang masih kurang dalam perencanaan pekerjaan
- 17 Membuat panduan target fisik (ROPK dan KAK)
- 18 Optimalisasi pemanfaatan layanan digital.
- 19 Menyusun road map RB dan rencana aksi RB general dan RB tematik
- 20 Sosialisasi RB serta pendampingan penyusunan rencana aksi RB Perangkat Daerah

